

## KRISIS IMIGRAN ILEGAL DAN KONFLIK PERBATASAN POLANDIA VERSUS BELARUS

Poltak Partogi Nainggolan

### Abstrak

*Uni Eropa (UE) menghadapi krisis migrasi penduduk ilegal dari TimurTengah, terutama yang masuk melalui perbatasan Belarus-Polandia. Sikap Belarus yang menawarkan kemudahan masuk melalui wilayahnya, sangat menguatirkan negara-negara anggota UE, tetangganya, karena berdampak atas keamanan domestik dan kawasan. Tulisan ini membahas ancaman keamanan UE yang datang dari perbatasan Polandia-Belarus akibat krisis imigran ilegal, dengan absennya solusi diplomatik. Respons Lukashenko kontraproduktif terkait sanksi isolasi UE pasca-pemilu curang dan sikap represifnya dalam menangani oposisi dan penentangnya. Penulis berkesimpulan bahwa pemimpin Belarus yang didukung penguasa Rusia, Putin, berusaha mendapatkan legitimasi dari UE melalui solusi diplomatik. Sementara UE menghindari jalur diplomatik karena tidak ingin mengakui Lukashenko yang kembali berkuasa lewat pemilu curang. Dengan studi kepustakaan dan analisis isi media cetak dan elektronik, tulisan ini menganalisis krisis regional imigran ilegal, respons Belarus dan tetangganya yang terancam, selain Rusia, yang berusaha melakukan intervensi, dan UE yang mengancam memberikan sanksi baru.*

### Pendahuluan

Sekitar 4.000 orang imigran, dan akan lebih banyak lagi jika tidak ada kebijakan menghentikannya (TV One, 15 November 2021: 20.02), pada awal November 2021, telah berusaha memasuki wilayah dan bertahan di perbatasan Polandia-Belarus, selain sisanya ke perbatasan Lithuania-Belarus serta Latvia-Belarus. Kasus ini menambah jumlah imigran ilegal sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai 9.287 orang, dengan jumlah 8.000 dalam tempo 2 bulan saja

dari Agustus-September 2021 (*Kompas*, 15 November 2021) yang telah berusaha masuk secara ilegal dari jalur perbatasan yang sama. Mereka terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak yang berusaha melintasi perbatasan Polandia-Belarus pada saat Eropa memasuki musim dingin yang buruk.

Para imigran ilegal dibiarkan masuk dari Belarus menuju Polandia, yang keduanya adalah anggota Uni Eropa (UE), sebagai pintu terakhir sebelum tiba di wilayah Eropa Barat, terutama



Jerman, yang makmur. Para imigran yang menyamar sebagai turis, terutama orang-orang Kurdi, Suriah dan lain-lain, menggunakan pesawat dari Turki (Istanbul dan Antalya), Lebanon (Beirut), Irak (Baghdad), dan Uni Emirat Arab (Dubai) dengan segala kemudahan yang diberikan ke Minsk, Belarus. Mereka diberikan visa turis selama 30 hari, yang berlaku bagi 76 negara, dengan segala kemudahan, dan kemudian dibantu petugas Belarus pemotong kawat sebelum menuju perbatasan Polandia. Pemerintah negara tujuan menduga terdapat kerja sama antara Pemerintah Lukashenko dengan organisasi perdagangan manusia.

Modus migrasi ilegal ini, jika dibiarkan, akan membuka akses dari Mediterania, yang merupakan jalur pengungsian dari Timur Tengah dan Afrika. Hal ini akan meningkatkan masalah ekonomi, sosial dan keamanan, khususnya ancaman terorisme, dari dalam dan luar negeri, karena telah terdeteksi dimanfaatkan ISIS. Belajar dari situasi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin (Venezuela, Ekuador, Haiti, Meksiko dan lain-lain) menuju Amerika Serikat, migrasi masif ini menguatirkan negara perbatasan dan tujuan di UE.

Para imigran yang tiba di Belarus dan tengah mencari rasa aman dari negeri-negeri asal mereka terancam kebijakan represif dan kekerasan aparat keamanan Polandia, Lithuania dan lain-lain di sepanjang perbatasan dengan negara-negara UE. Mereka selama berhari-hari telah menghadapi udara dingin yang hebat tanpa tersedianya *shelter*, penghangat, dan bahan makanan yang cukup. Tulisan ini membahas perkembangan dan dampak krisis migrasi penduduk secara ilegal, terutama dari Timur Tengah, terhadap stabilitas keamanan di Eropa dan hubungan UE dengan Rusia dan Alexander Putin, yang berusaha terus menunjukkan pengaruhnya di

tingkat regional maupun global. Data dikumpulkan dari berbagai media cetak dan elektronik untuk studi kepustakaan dan analisisnya.

### **Krisis Migrasi Penduduk Ilegal melalui Perbatasan**

Krisis masuknya imigran ilegal di perbatasan Polandia-Belarus ini menambah kasus-kasus yang telah terjadi di Italia, Yunani, Spanyol, dan Selat Calais di perbatasan perairan Prancis menuju Inggris. Hal ini menyusahkan tetangganya sesama anggota UE, yakni Lithuania dan Latvia, dan kemudian Ukraina, karena mengalminya penduduk secara masif dari wilayah Magribi (Tunisia, Maroko dan lain-lain), Arab dan Teluk, Timur Tengah (Afghanistan, Irak, Lebanon, dan Suriah), serta Afrika, seperti Yaman, Sudan, Nigeria, Mali, dan Ethiopia, yang dilanda krisis politik dan konflik internal berkepanjangan. UE juga menghadapi penduduk dari negara-negara terdekat dan Asia yang menghadapi krisis ekonomi berat akibat pandemi COVID-19, dan menginginkan kehidupan yang lebih baik di UE.

Modus terancang para migran untuk bisa masuk ke UE adalah dengan masuk sebagai turis ke Belarus, karena dari Minsk mereka diberikan kemudahan oleh petugas imigrasi di bandara untuk melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan. Para migran difasilitasi tentara Belarus untuk masuk ke UE melalui perbatasan Polandia, selain Lithuania dan Latvia. Kota-kota dan desa-desa di sepanjang perbatasan Provinsi Podlasie, Lublin, dan Warsawa menjadi lokasi paling terancam di Polandia dan menjelma sebagai tempat yang penuh derita bagi kaum migran yang membawa mimpi masa depan baru.

Mengingat kondisi para migran bertambah buruk akibat cuaca dingin, lembaga PBB untuk urusan pengungsi (United Nations High Commission for

Refugees –UNHCR) telah mendesak Polandia dan Belarus untuk menangani krisis migrasi penduduk ilegal ini secara lebih baik. Para imigran ilegal pun meminta belas kasihan kepada para pemimpin UE agar dibukakan akses masuk sehingga mereka selamat dari kematian. Perempuan dan anak dalam kondisi payah dan berusaha bertahan hidup dengan mencari kayu bakar untuk memanaskan diri dari sekitar hutan di wilayah perbatasan.

Krisis kemanusiaan berkembang tidak terkendali tanpa solusi UE dan negara-negara yang berkonflik kepentingan. Enam anggota Dewan Keamanan PBB menuding Belarus dengan restu pemimpin Rusia, Putin, telah menggunakan tragedi kemanusiaan ini sebagai senjata untuk mendestabilisasi negara-negara tetangganya yang adalah anggota UE. Hal ini dinilai sebagai retaliasi Lukashenko dan Putin atas para pemimpin UE yang telah mengisolasi mereka selama ini dalam Perang Dingin baru yang muncul pasca-intervensi Rusia terhadap Crimea dalam konfliknya dengan Ukraina, yang juga anggota UE. PM Polandia, Mateusz Morawiecki, mengecamnya sebagai ‘demonstrasi terorisme negara dengan pendekatan gangster’ yang tidak manusiawi, untuk memikat para migran dengan janji palsu masuk dengan mudah ke UE.

### **Ada Apa dengan Belarus dan Putin?**

Pemimpin Rusia, Alexander Putin, yang tidak disukai UE akibat politik otoriterismenya di dalam negeri, khususnya terhadap kaum oposisi dan pembangkang, sejak semula mendukung keputusan pemimpin Belarus, Lukashenko, pengikut setia dan penikmat jalan otoriterismenya. Aksi *show off* diperlihatkan Rusia dengan pengerahan jet-jet tempur Rusia terbang di atas wilayah udara Belarus.

Pemimpin Belarus membantah telah sengaja membuka akses dan memandu

para imigran masuk melalui negerinya. Selama ini politik represif Lukashenko melalui manipulasi pemilu meniru gaya pemerintahan Putin yang anti-demokrasi, telah mengganggu UE. Dalam perang kata-kata, PM Polandia, Mateusz Morawiecki, menuding Putin sebagai dalang di balik bertambah parahnya krisis imigran ilegal ini. Mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang disegani Putin selama ini, secara pribadi telah meminta orang kuat Rusia itu segera bertindak menekan Lukashenko.

Dengan mendukung Lukashenko, sebenarnya Putin tengah menjalankan *proxy*-nya. Ia mengajak Lukashenko, sekutunya, untuk melawan isolasi politik UE agar memperoleh posisi tawar yang diperhitungkan di mandala Eropa, di luar perang *proxy* yang diciptakan di Suriah dan lain-lain. Pemimpin Rusia tersebut tidak tinggal diam, melainkan melakukan serangan balik terhadap UE dengan menyatakan UE telah memperpanjang isolasi atas Rusia dengan menggunakan isu kemanusiaan. Pemimpin Belarus telah melancarkan serangan balik atas sanksi politik UE dengan menggunakan pengungsi dan migrasi penduduk, sebagai senjata perang generasi keempat (*war 4.0*). Penggunaan ‘senjata kemanusiaan’ ini merupakan bentuk perlawanan balik tanpa perlu keluar energi dan biaya besar, dibandingkan dengan menggelar perang menggunakan kekuatan militer.

Perang kata-kata berlanjut antara para pemimpin Belarus dan Rusia versus UE, yakni antara Menlu Belarus, Vladimir Makey, dan Presiden Lukashenko dan Putin meghadapai Menhan Polandia Mariusz Blaszczak di media massa. Di tengah meningkatnya kasus imigran ilegal ini, Putin melontarkan tuduhan bahwa UE menunjukkan sikap hipokritas mereka tanpa berusaha membantu untuk mencari solusi. Putin menolak tuduhan Barat yang menyatakan pihaknya telah bekerja sama

dengan Minsk untuk mengirim para imigran ilegal itu ke Polandia melalui perbatasan timur UE. Namun, berbeda dengan Lukashenko yang mengancam menghentikan pengiriman gas alam ke UE, Putin menolak melakukan aksi yang sama. Terlepas dari ini, ia tetap mewaspadai manuver dan latihan militer UE di Black Sea.

Sebelumnya, Lukashenko dengan garang berkata di depan televisi, "kami telah membuat berang UE, yang membuat mereka mengancam akan menutup perbatasan. Namun, bagaimana jika kami menghentikan suplai gas alam ke mereka?" (French 24, November 11, 2021). Dengan sikap dan kebijakannya, rezim Lukashenko kemudian dinilai sebagai ancaman bagi stabilitas regional. UE menilai ini sebagai 'serangan hibrida,' yang digunakan Belarus untuk mendorong para imigran menuju perbatasan eksternal blok komunitas ini (Media Indonesia, 11 November 2021).

### Reaksi dan Solusi UE

Delegasi AS dan UE di Dewan Keamanan (DK) PBB segera melakukan rapat darurat untuk menunjukkan reaksi keras mereka terhadap apa yang telah dilakukan Lukashenko yang telah mengundang para imigran ilegal masuk. Mereka menilai penguasa Belarus itu telah melakukan instrumentalisasi manusia yang dibuat untuk manusia yang kehidupan dan kesejahteraannya terancam demi tujuan politik. Mereka menuding Belarus melakukannya untuk mengacau negara-negara tetangga dan perbatasan eksternal UE, demi tujuan mengalihkan perhatian dari pelanggaran HAM yang telah dilakukan rezim. Oleh karena itu, UE meminta Belarus untuk menghentikan tindakannya yang dinilai tidak manusiawi dan membahayakan nyawa para imigran.

Secara sepihak, Pemerintah Polandia mengancam untuk menggunakan tindakan represif dengan pengerahan

kekuatan militer untuk menahan dan menghentikan laju migrasi. Inggris, yang telah keluar dari UE dan tengah terancam aliran imigran gelap melalui Calais lewat perbatasan perairan Prancis, telah mengirim tim militer khusus untuk membantu Polandia. Kehadiran mereka diperkirakan untuk mendeteksi dan mengawasi bahaya infiltrasi para pelaku ancaman keamanan non-negara, yakni para teroris. Perkembangan ini bisa berimplikasi pada eskalasi konflik Polandia versus Belarus, yang rawan melebar menjadi konflik terbuka (militer) UE versus Rusia. Secara politis, ia akan membangkitkan aksi-aksi rasis di Polandia dan meningkatkan dukungan bagi munculnya tokoh-tokoh populis baru dan kelompok-kelompok ekstrim kanan, khususnya partai-partai politik ultranasionalis di Jerman, Prancis, dan Austria, yang memiliki perbatasan dengan negara Eropa Timur, akses terakhir mereka menuju Eropa Barat.

Mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang sudah pensiun pun menghubungi Putin untuk menggunakan pengaruhnya menekan Belarus mengakhiri krisis migrasi internasional ini. Namun, sekalipun Putin mendukung pencarian solusi, ia mengingatkan bahwa UE harus mulai berbicara soal ini dengan Lukashenko, yang tidak mereka akui pasca-pemilu yang telah direayasa dan menaikannya kembali. UE menolak untuk membuka komunikasi dengan pemimpin Belarus itu setelah Lukashenko menunjukkan sikap represif dan anti-demokrasinya, meniru Putin, demi mempertahankan kekuasaannya yang korup.

Belarus lalu dipaksa patuh pada aturan perbatasan internasional, khususnya mengenai pengaturan mobilitas penduduk dan kebijakan imigrasi UE. Namun, karena situasi yang belum berubah signifikan, UE telah mengancam sanksi lebih berat pada

Belarus atas tudingan mengorganisasi aktivitas perdagangan orang, selain pemberian sanksi bagi 30 institusi, maskapai penerbangan, serta komoditi dan transportasi Belarus. UE telah sukses menekan Turki membatasi penerbangan langsung dari negeri itu ke Belarus, yang selama ini secara resmi sering dimanfaatkan oleh para imigran ilegal untuk masuk ke UE.

Pemerintah Turki pun telah melarang penerbangan warga asal Irak, Suriah, dan Yaman ke Belarus dari wilayahnya. Sedangkan Pemerintah Irak telah memulangkan warganya dengan mengirimkan pesawat. Tetapi masih ada sekitar 7.000 imigran ilegal di perbatasan Belarus-Polandia yang terus memaksa untuk diberikan akses masuk ke UE. Pemimpin UE bergeming, belum mau membuka komunikasi, apalagi memulai upaya diplomasi dengan Lukashenko, yang dinilai ilegal rezimnya. Dalam persoalan migrasi penduduk ilegal ini, Belarus maupun Rusia tampak berusaha menggunakannya sebagai alat mencapai posisi tawar yang kuat di tengah kepercayaan UE atas posisinya yang kuat dan solid secara politik dan ekonomi.

### Penutup

Stabilitas Eropa kian terganggu dengan krisis migrasi penduduk yang masuk secara ilegal melalui perbatasan Polandia dan Belarus. Putin dan Lukashenko sangat berpengaruh dalam menciptakan dan meningkatkan serta menurunkan eskalasi dan menghentikan konflik kedua pemimpin itu dengan para pemimpin UE. Itulah sebabnya, UE mengancam sanksi yang lebih berat terhadap Belarus dan Rusia yang telah diisolasi secara politik dan ekonomi.

Konsisten dengan kebijakan anti-otoriterisme, UE belum terpancing mengikuti keinginan Lukashenko, dengan membuka komunikasi apalagi

memulai langkah diplomasi untuk mengatasi krisis migrasi penduduk ilegal ini. Masing-masing pihak yang berseteru memperlihatkan respons dan sikap sepihak kubu mereka, sehingga solusi final yang dapat disepakati bersama belum tercapai. Dunia internasional akan melihat bagaimana kombinasi tekanan politik dan sanksi ekonomi akan bekerja secara lebih signifikan dalam mempengaruhi posisi tawar pihak-pihak yang berkonflik dan prospek konflik dan kondisi stabilitas keamanan Eropa.

Sambil mengemukakan justifikasi, pemimpin Belarus dan Rusia mempertahankan strateginya untuk keluar dari isolasi Barat. Terobosan baru diperlukan untuk menghadapi kebuntuan agar ketegangan politik tidak berujung pada munculnya konflik militer UE versus Belarus dan Rusia yang akan lebih mendestabilisasi Eropa. Sedangkan untuk mengurangi krisis kemanusiaan, akses bagi NGOs, terutama UNHCR, harus diberikan, agar tidak berjatuh korban serta Polandia dan Belarus tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Negara-negara harus bekerja sama mencegah migrasi penduduk ilegal melalui wilayahnya, dengan pemberian visa yang lebih cermat. Juga, dengan memfasilitasi pengiriman pulang warganya, seperti yang dilakukan Irak.

### Referensi

- Aivanni, Nur. "Putin Tudung Barat Sebabkan Krisis di Perbatasan Belarus," *Media Indonesia*, 13 November 2021, hal 14.
- "Belarus migrants: Poland PM blames Russia's Putin for migrant crisis," November 9, 2021, *BBC News*, tanggal dimuat, alamat situs, diakses 23 November 2021,

- Charlish, Alan and Robin Emmott. "Migrants try to breach Polish border as European Union readies Belarus sanctions," *The Jakarta Post*, November 6, 2021 p. 3.
- "Irak Pulangkan Ratusan Migran dari Belarus," *Kompas*, 27 November 2021, hal. 4.
- "Jerman Desak Sanksi untuk Belarus," *Media Indonesia*, 11 November 2021, hal. 14.
- "Ketegangan Uni Eropa-Belarus Terus Berlanjut." *Kompas*, 16 November 2021, hal. 4.
- "Sanksi Uni Eropa," *Media Indonesia*, 11 November 2021, hal. 14.
- Sytas, Andrius and Joanna Plucinska. "Neighbours of Belarus say migrant crisis risks military clash," 12 November 2021, alamat situs, diakses 24 November 2021.
- Winahyu, Atikah Ishmah. "Belarus Dituding Lakukan Terorisme Negara atas Krisis Migran." *Media Indonesia*, 14 November 2021, hal. A1.
- \_\_\_\_\_. "Barat Mengutuk Belarus karena Krisis Perbatasan," *Media Indonesia*, 13 November 2021, hal. 14.



Poltak Partogi Nainggolan  
*poltak.nainggolan@dpr.go.id*

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs - Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India* (2018) dan *Proxy War di Timur Tengah* (2019).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.